

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV. 1. Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ} 05' \text{ LU} - 3^{\circ} 05' \text{ LS}$ dan $108^{\circ} 30' - 114^{\circ} 10' \text{ BT}$ pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

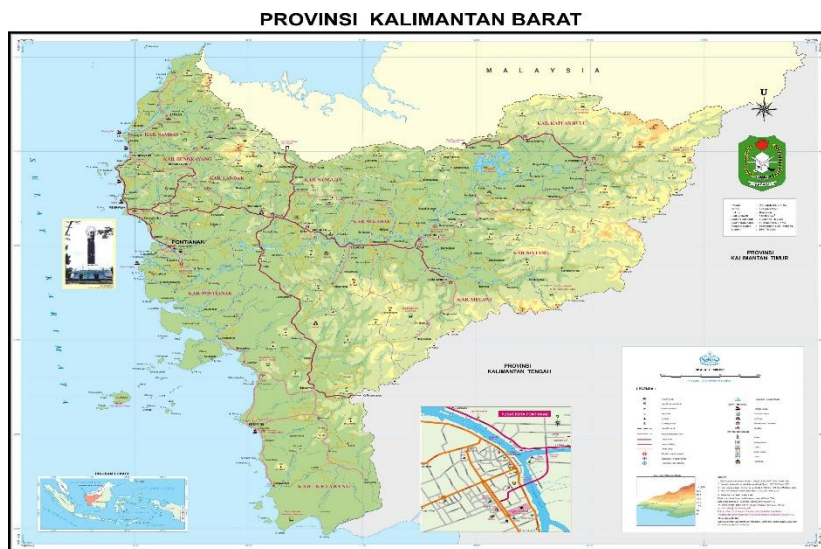
Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu : Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Kalimantan Barat



Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan dua

Kota. Gambaran mengenai luas, jumlah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administratif di Kalimantan Barat

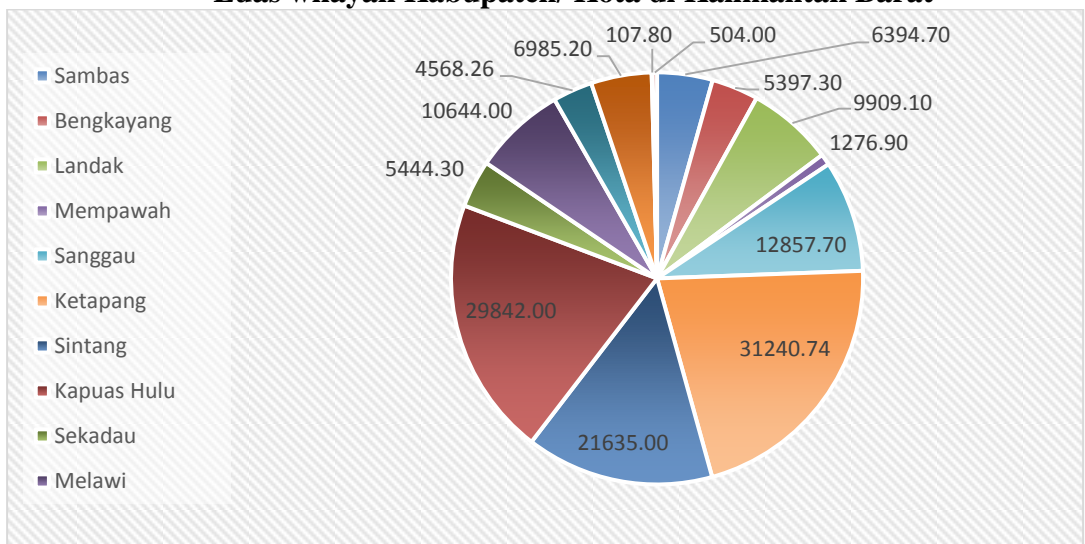
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1.	Sambas	19	193
2.	Mempawah	9	67
3.	Sanggau	15	169
4.	Ketapang	20	262
5.	Sintang	14	353
6.	Kapuas Hulu	23	282
7.	Bengkayang	17	124
8.	Landak	13	156
9.	Sekadau	7	87
10.	Melawi	11	169
11.	Kayong Utara	6	43
12.	Kubu Raya	9	116
13.	Kota Pontianak	6	29
14.	Kota Singkawang	5	26
	Jumlah	174	2076

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km²), kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km²) dan ketiga adalah Provinsi

Kalimantan Tengah (153.564 km²). Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km² atau 21,28 %) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 %), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya.

Grafik 4.1
Luas wilayah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat



IV. 2. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk berjumlah sekitar 4,789 juta jiwa, dimana sekitar 2,439 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,349 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka

kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 33 Jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam dengan segala potensi dan keragamannya. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten/kota,kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 % dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 41 jiwa. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang.

Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 (delapan) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni oleh sekitar 607.618 jiwa, rata-rata sekitar 5.637 jiwa per kilometer persegi.

Demikian juga laju pertumbuhan penduduk kota lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk kabupaten sebagaimana tergambar pada Tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota

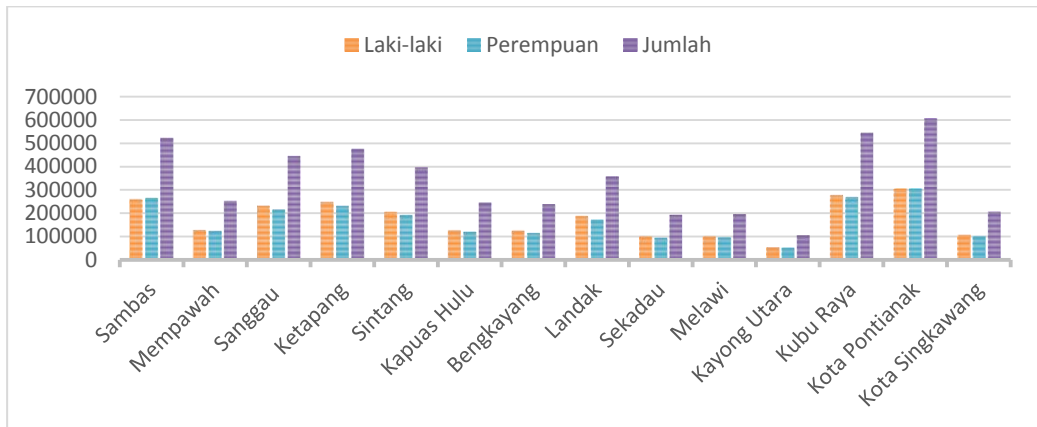
Tahun 2015

	Kabupaten/ Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbu- han (%)	Luas wilayah (Km2)	Kepadatan (jiwa/Km2)
		Laki- laki	Perem- puan				
1	Sambas	258475	264640	523115	1.10	6394.70	82
2	Mempawah	127607	124168	251775	1.51	1276.90	197
3	Sanggau	229799	214797	444596	1.70	12857.70	35
4	Ketapang	246227	229758	475985	2.10	31240.74	15
5	Sintang	204105	192287	396392	1.65	21635.00	18
6	Kapuas Hulu	125192	120806	245998	1.98	29842.00	8
7	Bengkayang	123874	114736	238610	2.01	5397.30	44
8	Landak	186282	171326	357608	1.61	9909.10	36
9	Sekadau	99586	93805	193391	1.27	5444.30	36
10	Melawi	100128	95871	195999	1.84	10644.00	18
11	Kayong Utara	53672	51805	105477	1.95	4568.26	23
12	Kubu Raya	276081	269328	545409	1.81	6985.20	78
13	Kota Pontianak	302739	304879	607618	1.84	107.80	5637
14	Kota Singkawang	106125	101476	207601	2.06	504.00	412

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Berikut adalah grafik penduduk Provinsi Kalimantan Barat menurut jenis kelamin dan kabupaten-kota tahun 2015

Grafik 4.2
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat menurut jenis kelamin dan
kabupaten-kota tahun 2015



Sumber : Kalbar Dalam Angka, 2016. Diolah

IV. 3. Visi, Misi dan Strategis Pembangunan Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masa bhakti 2013 – 2018 yang merupakan periode kepemimpinan kedua kalinya di Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan sasaran rencana strategis pembangunan daerah Kalimantan Barat.

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan periode lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dalam mewujudkan visi jangka panjang “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. RPJMD dijabarkan

kedalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indeksi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun.

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**. Sedangkan motto pembangunan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah **PERSATUAN DAN DEMOKRASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT**. Persatuan adalah keyakinan bahwa rakyat Kalbar terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang bhineka atau beranekaragam, yang sudah bersatu sebagai elemen dan disatukan dalam satu ikatan yang sama dan tunggal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Persatuan rakyat Kalimantan Barat dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang absolut, namun persatuan tersebut diimplementasikan secara sehat, dinamis, dan

konstruktif atas dasar persamaan hak dan kewajiban semua rakyat. Jadi, motto ini bermakna bahwa dengan semangat persatuan yang dilandasi oleh sistem demokrasi yang sehat, dinamis dan konstruktif akan dicapai kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Barat. Pada akhirnya, daerah dan rakyat yang sejahtera juga akan membawa persatuan dan kesejahteraan bagi Negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. Misi Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut misi RPJMD 2013-2018 :

- a. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
- c. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan

publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

- d. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
- e. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
- f. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

- h. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
- j. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

- a. Misi Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan, dengan tujuan:
 - 1) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial;
 - 2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan;
 - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang agama;
 - 5) Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan

pendidikan dengan tujuan; “meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan”;

c. Misi Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku dengan tujuan :

- 1) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan;
- 2) Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- 3) Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam.

d. Misi Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai dengan tujuan :

- 1) Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi;
- 2) Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas;

- 3) Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi;
 - 4) Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah.
- e. Misi Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi dengan tujuan:
- 1) Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah;
 - 2) Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri.
- f. Misi Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah;
 - 3) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan

dan aparaturn pemerintah;

- 5) Mewujudkan tertib manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- g. Misi Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan tujuan: “Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM”.
- h. Misi Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi dengan tujuan:
- 1) Memperluas lapangan/kesempatan kerja;
 - 2) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
 - 3) Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata;
 - 4) Meningkatkan daya saing daerah;
 - 5) Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi;
 - 6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui

pemberdayaan koperasi, dan UMKM.

- i. Misi Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai dengan tujuan: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan”.
- j. Misi Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan dengan tujuan :
 - 1) Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten;
 - 2) Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

IV. 4. Kinerja Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat, serta implementasi program pembangunannya.

Berdasarkan perkembangan APBD sampai dengan tahun 2016, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan APBD Provinsi Kalimantan Barat dari sebesar Rp. 4,571,000,932,843.00 pada tahun 2015, menjadi sebesar Rp. 4,571,483,500,000.00 pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan sebesar 0.01 %. Gambaran lengkap perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 s.d. tahun 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Volume APBD (Rupiah)
2012	2,837,408,853,315.00
2013	3,307,933,469,228.00
2014	3,768,215,710,326.00
2015	4,571,000,932,843.00
2016	4,571,483,500,000.00

Sumber : Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting, guna mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor kemandirian keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD-nya.

Berdasarkan perkembangan total pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 s.d. 2016, yang bersumber dari pendapatan asli daerah rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp1.113.387.576.315,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	39,24%
2013	Rp1.376.087.889.228,00	23,59%	Rp3.307.933.469.228,00	41,60%
2014	Rp1.664.104.567.995,00	20,93%	Rp3.768.215.710.326,00	44,16%
2015	Rp2.166.920.790.843,00	30,22%	Rp4.571.000.932.843,00	47,41%
2016	Rp1.923.033.474.000,00	-11,26%	Rp4.571.483.500.000,00	42,07%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Selain PAD, sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Secara umum

penerimaan dari dana perimbangan mengalami peningkatan dalam hal jumlah, namun terjadi penurunan dalam hal proporsi. Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah juga rata-rata mengalami peningkatan sejak tahun 2012 s.d 2016. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Perkembangan Dana Perimbangan Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 S.D 2016

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp1.207.642.847.000,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	42,56%
2013	Rp1.391.271.770.000,00	15,21%	Rp3.307.933.469.228,00	42,06%
2014	Rp1.536.091.549.831,00	10,41%	Rp3.768.215.710.326,00	40,76%
2015	Rp1.687.980.742.000,00	9,89%	Rp4.571.000.932.843,00	36,93%
2016	Rp1.690.288.626.000,00	0,14%	Rp4.571.483.500.000,00	36,97%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Tabel 4.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 S.D 2016

Tahun	Lain-lain pendapatan yang sah	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp 516.378.430.000,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	18,20%
2013	Rp 540.573.810.000,00	4,69%	Rp3.307.933.469.228,00	16,34%
2014	Rp 568.019.592.500,00	5,08%	Rp3.768.215.710.326,00	15,07%
2015	Rp 716.099.400.000,00	26,07%	Rp4.571.000.932.843,00	15,67%
2016	Rp 958.161.400.000,00	33,80%	Rp4.571.483.500.000,00	20,96%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Indikator yang digunakan dalam evaluasi makro pembangunan daerah adalah Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari IPM (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli), Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Penduduk

Miskin, Jumlah Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Investasi, dan Kawasan Lindung. Perkembangan indikator makro pembangunan Kalimantan Barat disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Perkembangan Pembangunan Kalimantan Barat

No	Indikator	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	97,53	97,92	98,05
2	Angka rata-rata lama sekolah	7,14	7,17	7,24
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	116,15	116,4	116,76
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	92,16	93,12	94,24
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	67,33	69,45	70,14
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,04	99,13	99,18
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69,59	70,81	71,79
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	52,67	55,1	55,48
9	Angka usia harapan hidup	69,66	69,76	65,59
10	Angka kematian Ibu Melahirkan	96	116	130
11	Angka kematian bayi	31	31	31
12	Prevalensi balita gizi buruk	3,4%	2,5%	7%
13	Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	0.96	0.96	0.95

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016, diolah

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan pendidikan terdiri atas angka melek huruf, angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD/SMP/SMA, dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/SMP/SMA.

Komponen lain dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang

menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir.

Indikator pendidikan yang juga mendukung pencapaian indeks pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Pada tingkat partisipasi, secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kondisi ini didorong oleh kesadaran orang tua dan anak mengenai pentingnya pendidikan semakin tinggi. Disamping itu, adanya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa kurang

mampu, sehingga memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Adanya penambahan sekolah baru dan penambahan ruang belajar serta adanya sekolah terpadu dan terbuka yang dapat menampung banyak siswa menjadi faktor pendukung meningkatnya partisipasi sekolah di Kalimantan Barat. Namun, pada jenjang SD tidak tercapainya target bukan disebabkan tidak berhasilnya program-program pada upaya peningkatan partisipasi sekolah, tetapi lebih disebabkan faktor tingkat ketertiban (orang tua) untuk memasukan anaknya pada jenjang SD semakin baik. Dimana, untuk diterima di SD saat ini minimal umurnya 6,8 tahun.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, prevalensi balita gizi buruk. Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2013 mencapai 69,66 tahun bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 69,76 tahun hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,10.

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk

diisi oleh pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan tren yang konstan dan cenderung menurun di tahun 2015.

IV. 5. Kondisi Kelembagaan Sebelum Restrukturisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah berkarakteristik Provinsi memiliki susunan struktur organisasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbagi dalam Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 masih menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan hukum. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir:
 - a) Biro Pemerintahan;
 - b) Biro Hukum;
 - c) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinir:
 - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan;
 - b) Biro Kesejahteraan Sosial.
 - c. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Umum;
 - c) Biro Humas;
2. Sekretariat DPRD Provinsi;
3. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;

- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - l. Dinas Perkebunan;
 - m. Dinas Kehutanan;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - p. Dinas Pendapatan Daerah;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan KB;

- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
 - i. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - j. Kantor Perwakilan Daerah Provinsi;
 - k. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - l. Inspektorat Provinsi;
 - m. Badan Kepegawaian Daerah;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
 - o. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - p. Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi;
 - q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - r. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - s. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Lembaga Lain terdiri dari:
- a. Sekretariat KORPRI Provinsi;
 - b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
7. Staf Ahli.